

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PARAMBAHAN
KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD LUTHFI

1710113004

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Alsyam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 12/PK-V/IV/2024

ABSTRAK

Dalam perencanaan pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari melibatkan lembaga lain. Lembaga yang berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Faktor pengawasan BPRN sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan Nagari, hal ini sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama* bagaimana pelaksanaan pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan serta yang *kedua* bagaimana konsep ideal BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan metode yang digunakan adalah Metode Analisis Kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggambarkan secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Berdasarkan penelitian yang diperoleh BPRN dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki beberapa tahap yang *pertama* adalah BPRN bersama pemerintah nagari mengunjungi masing-masing jorong dan terlibat ke dalam kegiatan musyawarah jorong yang dilaksanakan sebelum diadakannya musyawarah nagari. kemudian tahap yang *kedua* adalah tahap pelaksanaan pengawasan yang dimana BPRN melakukan pengawasn langsung dan tidak langsung. Kemudian adanya faktor pendukung serta penghambat BPRN dalam melakukan pengawasannya terhadap Pemerintah Nagari. Konsep ideal menurut Ketua BPRN adalah melakukan pengumpulan aspirasi masyarat sekali 3 bulan yang sebelumnya 6 bulan sekali, adanya mekanisme yang jelas atau panduan resmi dalam proses pengawasan dan keanggotaan BPRN Nagari Parambahan harus sesuai dengan latar belakangnya. serta BPRN dan Pemerintah Nagari bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan seminar atau pelatihan dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan yang di lakukan oleh BPRN.